

# ARTIKEL PROSIDING SEMINAR NASIONAL “REAKTUALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN INDONESIA”



**Judul Artikel:** Menggagas Proses Pembelajaran PPKn Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas yang Menyegarkan dan Memberdayakan untuk Mengatasi Problematika Internalisasi Konsep Kewarganegaraan (Studi di SMA Swasta Perguruan Harapan Mandiri, Medan)

**Penulis:** Chairussuriyati

**Editor:** Arief Wahyudi; Ramsul Nababan; Fazli Rachman

**Judul Prosiding:** Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; *Digital Library*, 15 Oktober 2019

**Penerbit:** Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

**Kota Penerbitan:** Medan

**Tahun Terbit:** 2019

**Halaman:** 25-38

## Saran Pengutipan:

Chairussuriyati. (2019). Menggagas Proses Pembelajaran PPKn Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas yang Menyegarkan dan Memberdayakan untuk Mengatasi Problematika Internalisasi Konsep Kewarganegaraan (Studi di SMA Swasta Perguruan Harapan Mandiri, Medan). Dalam A. Wahyudi, R. Nababan, & F. Rachman (Editor), *Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia; Digital Library, 15 oktober 2019* (hlm. 25-38). Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

## INFORMASI ARTIKEL

Artikel ini telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional “Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia” di *Digital Library* Universitas Negeri Medan, Medan – Sumatera Utara. Seminar Nasional tersebut diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Pada 15 Oktober 2019.

**Prosiding seminar nasional ini dapat diunduh di:**

[https://drive.google.com/open?id=1ZMI\\_eDXTvpn6Etj4roSBa32wNvSdA-AI](https://drive.google.com/open?id=1ZMI_eDXTvpn6Etj4roSBa32wNvSdA-AI)

# MENGGAGAS PROSES PEMBELAJARAN PPKN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG MENYEGARKAN DAN MEMBERDAYAKAN UNTUK MENGATASI PROBLEMATIKA INTERNALISASI KONSEP KEWARGANEGARAAN (STUDI DI SMA SWASTA PERGURUAN HARAPAN MANDIRI, MEDAN)

Chairussuriyati

SMA Swasta Harapan Mandiri, Medan  
chairussuryatish@yahoo.co.id

## Abstrak

Proses belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas sangat membutuhkan penyegaran. Untuk melakukan itu, ada banyak upaya yang dapat dilakukan, seperti menunjukkan relevansi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kehidupan sehari-hari siswa, menggunakan berbagai literatur dan alat belajar interaktif, mempertahankan peran guru sebagai fasilitator dan motivator untuk memberdayakan siswa untuk dapat untuk memberdayakan, menambahkan jumlah waktu untuk diskusi (pola interaksi guru-murid-murid), dan studi lapangan. Semua upaya ini diyakini dapat membantu siswa mendapatkan kompetensi yang diperlukan seperti yang diperintahkan oleh Kurikulum 2013.

**Kata kunci:** belajar dan mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, menyegarkan, memberdayakan, kurikulum 2013

## PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (selanjutnya disingkat menjadi PPKn) sejatinya menjadi bagian penting dalam suatu pembelajaran di sekolah, baik formal maupun informal. Hal tersebut nyata dari keberadaan PPKn yang berstatus wajib dalam kurikulum pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi. Muatan materi PPKn hampir sama pada setiap jenjang pendidikan, hanya saja ada penambahan muatan materi yang lebih mendalam untuk dipahami oleh siswa tiap jenjang.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Ini sekaligus merupakan suatu bukti bahwa keberadaan PPKn sangat penting dalam pembelajaran. Mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan adanya suatu ikatan tujuan. Adapun ikatan tujuan dimaksud dapat berwujud suatu ideologi nasional, yaitu Pancasila sebagai obyek dalam mata pelajaran PPKn.

Lebih jauh lagi, PPKn mengemban sejumlah fungsi berikut:

1. Membantu peserta didik sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman tentang cita-cita nasional/tujuan negara.

2. Peserta didik sebagai generasi baru dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara.
3. Dapat mengapresiasi cita-cita nasional dan mampu membuat keputusan-keputusan yang cerdas.
4. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia, dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sayangnya, hingga saat ini, masih ada banyak persoalan yang melingkupi proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, antara lain:

1. Terlalu menekankan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan mengingat/menghafal yang dalam praktiknya akan mematikan kreativitas peserta didik.
2. Metode pengajaran lebih menekankan proses deduktif dari pada proses induktif.
3. Isi atau substansinya terlalu “tinggi”, terlalu teoretis, abstrak, dan terkesan mencakup terlalu banyak hal.
4. Kurang memberi ruang bagi guru dalam mengembangkan materi untuk pendalaman terhadap komponen-komponen yang dianggap perlu.
5. Kurang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan materi lokal sehingga muncul kesan bahwa belajar PPKn bukan belajar tentang kenyataan hidup sehari-hari melainkan belajar sesuatu yang sangat asing bagi siswa.
6. Metode pembelajaran sangat monoton yang didominasi oleh ceramah satu arah.

Teknik pembelajaran kerap pula belum mampu menumbuhkan motivasi siswa. Inilah yang menjadi dilematika dalam internalisasi konsep kewarganegaraan. Seharusnya, proses pembelajaran itu dapat memacu keingintahuan siswa untuk membedah masalah-masalah seputar lingkungan sosialnya sekaligus dapat membentuk opini pribadi terhadap masalah tersebut sebagai warga negara yang berideologi Pancasila. Di sini, mereka bukan lagi dianggap sebagai kertas kosong atau pribadi yang menerima secara pasif sajian guru atau pribadi yang tidak mengetahui apa-apa, melainkan pribadi yang telah berinteraksi dengan lingkungan dan berhak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.

Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan proses pembelajaran PPKn yang menyegarkan dan memberdayakan pada jenjang Sekolah Menengah Atas sebagai solusi atas dilematika internalisasi konsep kewarganegaraan? Dan bagaimanakah harapan peserta didik (siswa/i SMA) terhadap proses pembelajaran tersebut? Inilah yang hendak diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah adalah, “Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan proses pembelajaran PPKn yang menyegarkan dan memberdayakan pada jenjang Sekolah Menengah Atas sebagai solusi atas dilematika internalisasi konsep kewarganegaraan?”

## KAJIAN PUSTAKA

### Kurikulum 2013

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus sebagai akumulasi respon terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini serta pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. Hal ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional.

Target pendidikan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat adalah para siswa memperoleh sesuatu yang nyata dirasa dan dialami selama berlangsungnya proses pendidikan yaitu pengalaman hidup dari terjadinya proses pendidikan yang tentu dampaknya lebih kuat daripada sekedar pengalaman pendidikan yang terlalu berpedoman terhadap kurikulum (Djohar, 2003, h. 87).

Untuk kepentingan itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan Kurikulum 2013 yang pada hakekatnya merupakan penguatan terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (*organizing elements*) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

Upaya penyempurnaan kurikulum ini dilakukan guna mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya.

Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pematapan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai

dan berbagai dimensi intelegensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Pengajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas berfungsi untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu juga anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ruang lingkup mata pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang mengatur tentang Keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.
2. Dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.
3. Peran Indonesia dalam hubungan internasional.
4. Strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
5. Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
6. Pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama, dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
7. Perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara, dan pemerintahan daerah.
9. Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.
10. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.
11. Dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik.
12. Macam-macam budaya politik di Indonesia.
13. Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.
14. Makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.
15. Bentuk Negara dan Pemerintahan.
16. Sistem Pemerintahan Negara.
17. Kedaulatan Negara.
18. Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Otonomi daerah.
20. Sistem hukum Indonesia.
21. Sistem peradilan Indonesia.

Dilihat dari teknis pelaksanaannya, Kurikulum 2013 memudahkan guru dalam menyajikan pengalaman belajar. Hal ini karena Kurikulum 2013 sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*) dan belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*).

Jika disimak, Kurikulum 2013 tampaknya akan memberikan harapan dan melahirkan solusi yang terbaik bagi persoalan pendidikan di tanah air. Sebab filosofi Kurikulum 2013 adalah merangsang kemandirian peserta didik dalam mengaktualisasikan segenap potensinya dengan mengurangi superioritas pendidik. Bila metode ini dijalankan, impian kita untuk menjanjikan sebagai lokomotif pembangunan bukan lagi fatamorgana. Namun, bagaimanapun baiknya sebuah kurikulum apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan benar, maka harapan-harapan yang direncanakan tidak akan tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh Ravik Karsidi (2005) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting. Kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

### **Proses Pembelajaran dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan**

Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat, karena apabila disadari arti pendidikan sebagai proses transfer pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat demi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, serta bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota.

Dalam pengertian dimaksud, pendidikan sudah dimulai sejak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar dirinya, yakni keluarga. Barulah kemudian, setelah cukup usia, individu juga dididik dalam lingkungan sekolah. Menurut Webster (dalam Hasbullah, 1999), sekolah merupakan tempat atau institusi/lembaga yang secara khusus didirikan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar dan pendidikan. Sebagai institusi, sekolah adalah tempat mengajar murid-murid, melatih serta memberi instruksi-instruksi tentang suatu lapangan keilmuan maupun keterampilan tertentu kepada peserta didik.

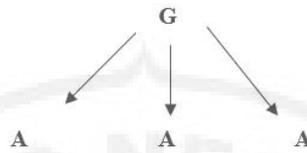
Lebih lanjut, Ravik Karsidi, Guru Besar Sosiologi Pendidikan dari FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, menyebutkan bahwa sekolah memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat suatu pekerjaan.
2. Sebagai alat transmisi kebudayaan.
3. Sekolah mengajarkan peranan sosial.
4. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan.
5. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib.
6. Menciptakan integrasi sosial.
7. Melakukan pengendalian sosial.

Proses belajar-mengajar akan senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa/i selaku pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar, dimana siswa/i adalah subjek pokoknya. Pola interaksi guru (G)–anak didik (A) oleh Usman (2000), diklasifikasikan atas tiga jenis berikut:

1. Pola Guru-Anak Didik

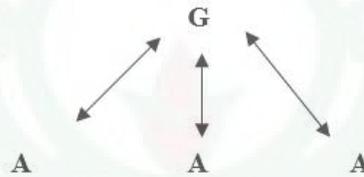
Gambar 4. Pola Guru-Anak Didik



Komunikasi sebagai aksi (satu arah)

2. Pola Guru-Anak Didik-Guru

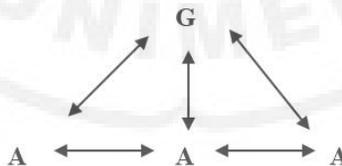
Gambar 5. Pola Guru-Anak Didik-Guru



Ada balikan (*feed back*) bagi guru, tidak ada interaksi antar anak didik (komunikasi sebagai interaksi).

3. Pola Guru-Anak Didik-Anak Didik

Gambar 6. Pola Guru-Anak Didik-Anak Didik



Interaksi optimal antara guru dan anak didik, serta antar anak didik (komunikasi sebagai transaksi, multi arah).

Yang paling tepat di antara ketiganya adalah Pola Guru – Anak Didik – Anak Didik, karena sangat sesuai untuk mengaktifkan potensi anak didik (murid). Mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya, dengan guru sebagai pembimbing. Dalam peranannya ini, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses pembelajaran yang kondusif.

Demi mengoptimalkan capaian proses pembelajaran, guru dituntut mampu menempatkan dirinya sebagai sosok yang mempunyai kewibawaan dan otoritas tinggi, guru harus bisa menguasai kelas serta mengontrol anak didiknya. Namun, guru juga mesti bisa menjaga supaya tidak timbul jarak sosial yang terlalu senjang dengan anak didik.

Guru seharusnya bisa menimbulkan suasana nyaman dalam berhubungan dengan anak didik, sehingga mereka leluasa menimba ilmu dan mengembangkan potensinya.

Kesalahan terbesar seorang guru adalah bila anak didik merasa takut terhadap sikapnya yang kasar dan kerap menerapkan disiplin secara berlebihan. Bukankah lebih baik bila anak didik menyegani seorang guru karena kecakapan serta pengetahuannya ketimbang faktor-faktor lain? Ini agar tidak timbul persepsi negatif dalam benak anak didik.

Dalam proses pembelajaran PPKn, misalnya, ketika persepsi negatif merasuki pikiran siswa, minat dan motivasi belajarnya merosot. Interaksi belajar dalam kelas cenderung monoton. Guru asyik berceramah, sedangkan para siswa mengangguk-angguk pertanda guru harus segera mengakhiri pembelajaran itu. Ada yang melakukan aktivitas yang lain, seperti mengganggu teman, dan melamun. Saat diadakan evaluasi, dipastikan banyak yang menunjukkan ketidaktentuannya, lalu mereduksi bahwa mata pelajaran sosial seperti PPKn sulit dan menjenuhkan. Akibatnya, akan terjadi dilema saat guru berupaya menginternalisasikan berbagai konsep kewarganegaraan.

Pendidikan sebenarnya mutlak dipahami sebagai rangkaian usaha pembaharuan. Pendidikan pada hakikatnya tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat. Persoalan pendidikan bukanlah terutama pada target pengetahuan yang ditetapkan, melainkan pada bagaimana anak didik dapat berinteraksi/berdialog dengan situasi dan kondisi jamannya.

Paulo Freire, tokoh pendidikan terkemuka, mengembangkan pemahamannya tentang pendidikan dari pandangan mendasarnya yang banyak dikritik orang, yaitu bahwa dunia hanya terbagi atas 2 kelompok: kelompok penindas (*oppressor*) dan kelompok tertindas (*oppressed*). Setiap orang pastilah menjadi bagian dari salah satu kelompok, entah dia si penindas atautkah si tertindas. Dalam kerangka pemahaman ini, praktik belajar-mengajar yang banyak terjadi sebelumnya dapat dipandang sebagai pendidikan yang menindas karena hanya melakukan proses “satu arah” dari guru kepada murid. Paradigma yang mengandalkan hafalan ini berwatak pasif, tidak menyulut keberanian, penalaran dan kreativitas, padahal nalar dan kreativitas inilah yang dibutuhkan oleh rakyat tertindas untuk melawan.

Freire berpendapat bahwa dalam pendidikan, peserta didik tidak boleh dipahami sebagai obyek tersendiri yang harus digarap dan diisi oleh pendidik. Dalam istilah Freire, sistem pendidikan seperti itu disebut sebagai sistem bank (*banking education*), di mana peserta didik adalah tabungan dan pendidik sebagai penabung. Pandangan tentang pendidikan semacam ini pada praktiknya cenderung bersifat otoriter dan menghalangi kesadaran peserta didik untuk berkembang. Aktivitas pendidikan kemudian berbelok menjadi tindakan-tindakan menundukkan peserta didik terhadap nilai-nilai dan norma budaya yang ada di masyarakat, dimana pendidik berperan sebagai agennya.

Sebagai ganti sistem di atas, Freire menawarkan sistem hadap-masalah (*problem-posing education*). Dalam sistem ini, Freire menekankan metode pendidikan yang disebut “pendidikan dialogis” di mana terdapat suatu dinamika dialektik antara pendidik dengan peserta didik. Penekanannya adalah pada kesadaran pendidik dan peserta didik mengenai kemampuan dan keberanian menghadapi realitas secara kritis dan bertindak mengubah dunia secara kreatif.

Dengan demikian, pendidikan harus berorientasi mengarahkan manusia pada pengenalan akan realitas diri dan dunianya dengan melibatkan dua unsur, yakni pengajar dan pelajar di satu pihak sebagai subyek yang sadar (*cognitive*) dan realitas dunia di pihak lain sebagai obyek yang tersadari (*cognizable*). Di sini, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator bagi tumbuhnya perkembangan kesadaran peserta didik, namun

sekaligus menjadi seorang rekan yang melibatkan dirinya sambil merangsang daya pemikiran kritis peserta didik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya terhadap satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Adapun studi kasus dapat melacak urutan peristiwa hubungan antar pribadi, menggambarkan subbudaya, dan menemukan fenomena kunci. Hubungan antar pribadi dan subbudaya adalah hal-hal yang hampir pasti ditemukan dalam suatu proses pembelajaran. Itulah sebabnya, peneliti memilih mengaplikasikan jenis penelitian ini.

Unit analisis adalah seluruh siswa/i SMA Swasta Harapan Mandiri yang mempelajari PPKn, yakni Kelas X, XI, dan XII. Adapun informan dipilih yang memenuhi kriteria berikut: (1) tercatat sebagai siswa/i SMA Swasta Harapan Mandiri di kelas X, XI, atau XII, dan; (2) menunjukkan sikap yang kooperatif atau justru sebaliknya, tidak kooperatif, dalam mata pelajaran PPKn.

Kriteria tersebut ditetapkan agar diperoleh informan yang benar-benar bisa memberikan informasi sesuai harapan, termasuk alasannya menyukai maupun tidak menyukai mata pelajaran PPKn. Dari kriteria tersebut, diperoleh 30 orang informan yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian, yaitu masing-masing 10 (sepuluh) orang dari kelas X IPS, XI IPS, dan XII IPS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengatasi Dilematika dengan Menggugah Minat Siswa/i Mempelajari PPKn**

Seluruh informan, baik dari kelas X, XI, maupun XII di SMAS Harapan Mandiri, mengaku bahwa proses pembelajaran yang diterima selama ini di jenjang Sekolah Menengah Atas cukup baik dan mampu menimbulkan ketertarikan untuk mendalaminya lebih lanjut.

Siswa/i kelas X antusias mempelajari PPKn karena membuat mereka lebih memahami peran Indonesia dalam hubungan internasional.

“Wah, ternyata Indonesia disegani di kancah internasional. Saya jadi semakin bersemangat mengejar cita-cita menjadi diplomat. Semoga nantinya bisa membanggakan bangsa dan negara.”

(Wawancara dengan informan Raka Reynata, 2 September 2019)

Bagaimana halnya dengan siswa/i kelas XI dan XII? Mereka pun memiliki minat yang tak kalah besar untuk mempelajari PPKn, terlebih lagi bila dalam proses pembelajaran juga diberikan contoh-contoh nyata yang mampu mendekatkan dengan realitas aktual masyarakat demi menghindari dilematika internalisasi konsep kewarganegaraan, tidak melulu terpaku atau berkuat pada uraian buku teks. Penggunaan literatur kepustakaan yang beragam dirasakan turut pula memberikan kesegaran, karena penyampaian materi oleh guru menjadi lebih beragam dan mendalam, bukan hanya mengulangi penjelasan di buku pegangan yang sudah dimiliki oleh siswa/i.

“Menurut pendapat saya, proses pembelajaran PPKn di SMA cukup efektif, dilihat dari sumber-sumber materi yang diberikan oleh guru, berasal dari banyak buku sehingga memberikan variasi dalam menambah wawasan tentang PPKn. Selain itu, juga sering diadakan diskusi yang bermanfaat, sehingga kami bukan hanya paham, tetapi juga mampu menghayati dan menjalankan pesan yang disampaikan dalam pembelajaran.”

(Wawancara dengan informan Ridho Azmi, 3 September 2019)

Dalam proses pembelajaran PPKn, guna mengatasi dilematika internalisasi konsep kewarganegaraan, maka yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah melenyapkan persepsi kronis bahwa ilmu-ilmu sosial itu membosankan karena penyajiannya bertele-tele dan untuk menguasainya dibutuhkan kemampuan menghafal luar biasa. Ini bisa dilakukan melalui upaya memperkenalkan PPKn sebagai ilmu yang dekat dengan kehidupan sosial keseharian siswa/i. Penyampaian materi harus tepat sasaran dan sesuai situasi sosial lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, siswa/i dapat lebih mudah mengasosiasikan materi tersebut terhadap kenyataan hidupnya serta menggunakannya sebagai pedoman sikap/perilaku. Setelah mampu melakukan asosiasi, selanjutnya siswa/i dipastikan akan merasakan manfaat dari mempelajari PPKn, sehingga minat untuk menekuninya bisa muncul. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan.

“Saya sudah rasakan manfaatnya. Dalam materi tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kami diajarkan bahwa demokrasi harus diterapkan dalam segenap bidang kehidupan. Ini saya terapkan dan hasilnya betul-betul bikin anggota kelompok makin merasa memiliki suatu keputusan dan menghindari konflik yang memecah-belah. Makanya, saya makin tertarik belajar PPKn.”

(Wawancara dengan informan Bhimo Adrian, 3 September 2019)

Motivasi dapat timbul bila ada pemenuhan kebutuhan secara signifikan dalam mempelajari sesuatu. Siswa/i akan termotivasi jika ia menemukan manfaat yang berarti bagi dirinya, sehingga kemudian bisa dilanjutkan dengan berlangsungnya aktualisasi diri melalui proses pembelajaran. Sebagaimana dikatakan oleh Abraham Maslow (1908-1970), dalam teorinya, yakni bahwa semakin tinggi *need of achievement* atau tuntutan pemenuhan kebutuhan berprestasi yang dimiliki seseorang maka akan kian serius ia menggeluti suatu hal. Jadi, guru dituntut menjadi motivator yang mampu memperlihatkan sejumlah manfaat pada setiap sajian pembelajaran PPKn.

Para informan mengaku bahwa mereka lebih menyukai proses pembelajaran yang sarat diskusi, baik antara guru dengan siswa/i maupun antara sesama siswa/i.

“Saya lebih suka kalau sering-sering diskusi dan memang selama ini begitu. Guru sering mengajak diskusi tentang berbagai masalah yang menarik, seperti pelanggaran HAM. Dengan diskusi, kita jadi lebih tertarik belajarnya.”

(Wawancara dengan informan M. Zaki Fuadi, 2 September 2019)

Diskusi yang baik memang merupakan elemen penting pada proses pembelajaran. Dalam diskusi, guru berperan sebagai fasilitator yang membelajarkan siswa/i. Mereka dibangkitkan keingintahuannya untuk membedah berbagai masalah seputar lingkungan sosialnya dan membentuk opini terhadap masalah tersebut berdasarkan teori serta konsep yang telah dipelajarinya. Apabila opini tadi kurang tepat, maka guru dapat menunjukkan

yang benar atau membantu mencari alasan, bukti, juga referensi ilmiah demi mengkonstruksi pengetahuan baru. Semua dilakukan dengan tetap melatih kemampuan berpikir dan berinteraksi secara benar (ingat Pola Interaksi Guru-Anak Didik-Anak Didik) sehingga mereka tertarik lantas berkesimpulan, “Saya berpikir, maka saya ada; saya mengalaminya, maka saya bisa.”

### **Persepsi Siswa/i tentang Materi Pelajaran PPKn dan Internalisasi Kewarganegaraan**

Semua informan mengakui bahwa peran guru dalam mengelola kelas sangat penting demi menciptakan kondisi belajar yang mendukung proses pembelajaran PPKn. Materi apapun yang hendak disampaikan, bila guru menyajikannya dengan variatif dan disertai contoh-contoh nyata, informan yakin akan dapat memahami, menghayati, hingga menjalankannya. Hanya saja, memang ada materi-materi tertentu yang lebih diminati siswa/i karena dirasa sangat relevan dengan kehidupan sosial sehari-hari, misalnya bahasan tentang Kasus Pelanggaran HAM, Perlindungan dan Penegakan Hukum, serta Otonomi Daerah.

Bahasan tentang kasus pelanggaran HAM disukai karena dinilai informan memberikan keterampilan sosial yang mereka butuhkan dalam mengelola hubungan agar tidak melanggar HAM. Demikian pula bahasan mengenai perlindungan dan penegakan hukum dirasa cukup bermanfaat untuk memampukan mereka mengembangkan budaya sadar hukum. Sedangkan topik otonomi daerah dipilih sebab memberikan gambaran tentang otonomi secara konseptual dan faktual, serta sikap positif yang harus ditunjukkan untuk menyikapi kebebasan di era otonomi.

Saat ditanyakan mengenai materi yang tidak disukai, informan siswa/i kelas X IPS, XI IPS, dan XII IPS mengemukakan bahwa sejauh ini mereka menyukai seluruh materi yang telah dipelajari.

### **Menuju Proses Pembelajaran PPKn yang Menyegarkan dan Memberdayakan**

Bila berbicara tentang upaya untuk menyegarkan kembali proses pembelajaran PPKn guna menghindari dilematika dalam proses internalisasi konsep kewarganegaraan tentunya tidak terlepas dari keharusan menciptakan suasana antar hubungan yang kondusif antara guru dan peserta didik. Di sini, guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator serta motivator bagi tumbuhnya perkembangan kesadaran peserta didik, namun sekaligus menjadi seorang rekan yang melibatkan dirinya sambil merangsang daya pemikiran kritis siswa/i.

Penyampaian materi pelajaran pun hendaknya dilakukan dengan media yang interaktif dan atraktif, seperti alat peraga, skema/diagram, artikel, atau film pendek. Diharapkan siswa/i dapat merasa at home, menyenangkan pelajaran, merasa membutuhkan ilmu itu, serta mampu melaksanakan pesan pembelajaran. Siswa/i selanjutnya diharapkan bisa menerjemahkan isi pesan dimaksud ke dalam ranah-ranah kognitif karena dari situlah sumber kompetensi untuknya serta haluan evaluasi bagi guru. Siswa/i memiliki keahlian kognitif, psikomotorik, maupun afektif yang terukur.

Akan lebih menyegarkan pula jika peran aktif siswa/i dalam mengeksplorasi dan mengkonstruksi pengetahuannya, melalui diskusi maupun dialog, diutamakan. Siswa/i dibimbing, bukan dipaksa, mengikuti pola-pola kognitif baku juga mengembangkan

konsep pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut referensi ilmu serta kebenaran epistemologis tertentu.

Melakukan proses pembelajaran langsung di tengah masyarakat dalam konteks studi lapangan. Bagaimanapun, laboratorium bagi mereka yang mempelajari PPKn adalah masyarakat, sehingga mustahil bila pembelajaran hanya dilangsungkan sebatas pertemuan tatap muka pada ruang kelas.

“Kalau bisa pembelajaran PPKn depan lebih banyak praktik atau kunjungan, misalnya ke pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan seringnya ke lapangan, pembelajaran PPKn pasti lebih menyenangkan.”

(Wawancara dengan informan Visko Jimmy, 4 September 2019)

“Harapan saya, dalam tiap kegiatan belajar PPKn disertai praktik langsung di lapangan atau berkunjung ke lembaga-lembaga negara supaya kami lebih paham juga menjiwai dengan jelas apa yang diajarkan.”

(Wawancara dengan informan Fuji Saragih, 4 September 2019)

Apa yang telah dipelajari langsung bisa diaplikasikan di masyarakat dan dibuktikan kesesuaiannya dengan kondisi riil lingkungan sosial, demikianlah seharusnya proses pembelajaran PPKn. Akan lebih baik juga bila guru mampu memberdayakan peserta didik agar mampu memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, saat mempelajari tentang Demokrasi Pancasila, guru bisa mengajak siswa agar terampil memberdayakan bersendikan kearifan setempat berbekal Model Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*). Dengan demikian, takkan ada dilema saat menginternalisasikan konsep demokrasi di benak dan pikiran peserta didik.

**Generasi Muda, Kader Demokrasi Pancasila (GM-KDP)**, inilah penamaan tepat bagi kegiatan yang akan dilaksanakan, sekaligus menjadi awal mula penentuan pertanyaan mendasar (*start with the essential questions*) serta mendesain perencanaan proyek (*design a plan for the project*). Awalnya, para fasilitator diharapkan mencari serta mengajak sebanyak mungkin remaja sebayanya untuk menjadi partisipan. Perlu diingatkan kepada calon partisipan bahwa mengikuti pemberdayaan adalah wujud kebebasan mereka untuk berkegiatan secara bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara, sebagaimana dijamin oleh Demokrasi Pancasila.

**Kenal Demokrasi Pancasila** adalah tahap pertama dalam kegiatan pemberdayaan, dimana fasilitator berupaya membimbing para partisipan untuk mengenal beberapa aspek pokok dari Demokrasi Pancasila, yang terdiri atas:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
3. Keseimbangan antara hak-kewajiban.
4. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara atau pun orang lain.
5. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Pada tahap ini, sesuai jadwal yang telah ditentukan (*create a schedule*), para partisipan juga perlu disadarkan bahwa Demokrasi Pancasila sangat bersesuaian dengan ajaran universal berbagai agama. Berawal dari ajaran Islam, secara umum, setiap umat Islam wajib mendukung kebaikan dan menegakkan kebenaran (*amar ma'ruf nahi*

*munkar*). Demokrasi Pancasila, selama bertujuan mencapai kemajuan dan kesejahteraan, jelas merupakan hal baik, sehingga layak didukung.

Ajaran Kristen memberi ruang pula bagi tumbuh dan berkembangnya budaya demokrasi. Ini dipraktikkan dalam pemilihan murid pengganti Yudas untuk menggenapi jumlah yang dibutuhkan guna pelaksanaan tugas pelayanan (Kisah Para Rasul 1: 15-26). Ketika hendak memilih pemimpin pun, umat Kristen diingatkan untuk berdoa terlebih dahulu, agar Tuhan memberi inspirasi bagi pilihan terbaik (Yohanes 15: 16a).

Adapun ajaran Hindu, mengutip Buku Arthashastra yang telah terbit 18 abad lalu, menjelaskan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan mutlak dibutuhkan adanya aturan-aturan demi mencegah hegemoni pemimpin. Warga masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan aturan tersebut dan berhak untuk memilih sosok pemimpin yang diinginkannya.

Ajaran Buddha pun tak ubahnya. Menurut *Aganna Sutta*, Sang Buddha menekankan pentingnya demokrasi demi memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada mulanya, manusia dilahirkan tanpa perbedaan kedudukan. Semua anggota masyarakat leluasa memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi, kehidupan yang damai mulai terganggu ketika ada manusia yang serakah, licik, dan gemar menindas. Akhirnya, dipilihlah salah seorang anggota masyarakat yang dianggap cakap sebagai pemimpin untuk mengadili orang-orang yang memiliki sikap tak terpuji. Pemimpin itu dipilih banyak orang dan diangkat melalui persetujuan bersama. Demikianlah awal mula bertumbuhnya demokrasi dalam perspektif Buddha.

Bagaimana halnya dengan ajaran Konghucu? Ternyata, dalam perspektif Konghucu, hadirnya suatu negara tak lain dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Ajaran Konghucu menekankan kepada para pemimpin agar senantiasa memberikan teladan terbaik bagi rakyatnya agar tetap dipercaya memegang tampuk kepemimpinan. Sebuah petikan dalam ajaran Konghucu mengingatkan bahwa, “Tuhan melihat seperti halnya rakyat melihat dan Tuhan mendengar seperti halnya rakyat mendengar.”

Jika partisipan telah cukup memahami segala aspek dari Demokrasi Pancasila yang sarat kearifan dan tuntunan kehidupan, maka kegiatan pemberdayaan pun berlanjut pada **Manfaat Demokrasi Pancasila**. Sebagai permulaan, tentu tepat bila memperkenalkan betapa bangsa Indonesia terdiri dari banyak ras, suku, dan agama. Dengan mengedepankan Demokrasi Pancasila, maka banyak kebaikan yang dapat dipetik melalui kerja bersama seluruh warga negara, tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Dalam masyarakat multikultural Indonesia, perbedaan hendaknya tidak dianggap sebagai alasan untuk berselisih, melainkan dijadikan modal sosial untuk saling mendukung dan melengkapi demi mewujudkan kemajuan serta kemegahan sebagai bangsa yang besar.

Tahap selanjutnya adalah Berdaya Demokrasi Pancasila. Sembari guru memonitor kemajuan proyek (*monitor the progress of the project*), para fasilitator perlu diingatkan agar mengajak partisipan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu proyek bersama di lingkungan sekitarnya, dengan melibatkan kaum muda berbeda latar belakang dan mengedepankan prinsip Demokrasi Pancasila. Bagi yang memiliki pengetahuan memasak, misalnya, dapat merintis wirausaha kuliner pembuatan kue tradisional, kue kering, ataupun jenis makanan lainnya. Bagi yang menguasai khasiat beragam tanaman pun bisa dimanfaatkan guna memulai wirausaha jamu racikan. Ini diharapkan membiasakan partisipan terlibat bersama sesama apa pun latar belakangnya. Tentunya,

semua membutuhkan kerja keras sebagaimana ditegaskan kearifan lokal Jawa Timur berbunyi '*jer basuki mawa bea*' (untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan pastinya senantiasa membutuhkan kerja keras dan pengorbanan). Oleh sebab itu, para partisipan hendaknya selalu pantang menyerah dalam berikhtiar dan mencari pemecahan masalah sesuai kearifan lokal Minangkabau (*tak ada kusuik nan tak salasi*). Hanya dengan demikian, tumbuhnya generasi muda sebagai kader Demokrasi Pancasila dapat segera mewujudkan.

Tahap akhir dari pemberdayaan adalah Mantap Demokrasi Pancasila, dimana para partisipan diajak untuk terampil berorganisasi. Melalui organisasi bentukannya sendiri, partisipan diharapkan mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih lepas dan terbuka, mempromosikan Demokrasi Pancasila, sekaligus sigap mengambil keputusan (*decisive*). Organisasi tersebut juga dapat diarahkan sebagai wadah untuk menyemai dan memupuk keberadaan Demokrasi Pancasila, mulai dari lingkungan terkecil serta sesegera mungkin. Dengan demikian, organisasi tersebut pun akhirnya bisa melaksanakan pesan kearifan lokal Jawa Timur bahwa hidup haruslah memberi manfaat (*wrip iku urup*). Partisipan pun dipastikan telah sungguh-sungguh mampu menghayati serta mengamalkan Demokrasi Pancasila. Di akhir model, guru tentunya perlu menguji hasil (*assess the outcome*) internalisasi demokrasi pada peserta didik, sekaligus mengevaluasi pengalaman (*evaluate the experience*) demi memastikan mereka benar memahami, menghayati, juga mampu mengamalkan demokrasi dalam kehidupannya.

## KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan proses pembelajaran PPKn yang menyegarkan dan memberdayakan guna mengatasi dilematika yang membayangi internalisasi konsep kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, yaitu:

1. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu menyajikan contoh-contoh nyata untuk menunjukkan relevansi materi pelajaran dengan realitas aktual masyarakat.
2. Penggunaan literatur yang beragam, dengan didukung media pembelajaran interaktif dan atraktif, seperti alat peraga, skema/diagram, artikel, atau film pendek.
3. Peran guru sebagai fasilitator dan motivator untuk mengembangkan kreativitas siswa/i.
4. Memperbanyak diskusi dan dialog, sesuai Pola Interaksi Guru-Anak Didik-Anak Didik.
5. Kegiatan studi lapangan dan proses pembelajaran langsung di tengah masyarakat.
6. Guru dapat memberdayakan peserta didik, dalam kerangka model pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*), agar terampil memberdayakan seturut materi PPKn dan bersendikan kearifan lokal setempat agar lebih membumi serta membantu siswa demi mudah menginternalisasikan konsep kewarganegaraan.

Akhirnya, harus diingat bahwa belajar yang sesungguhnya adalah proses mentransfer konsep, seperti mempunyai kemampuan mengetahui apa yang dipelajari, membahasakannya dengan bahasa sendiri, menerapkannya dalam konteks praktis, mempunyai keahlian untuk membandingkan dan menganalisa serta bisa memberikan kesimpulan logis bersifat deduktif maupun induktif, untuk seterusnya bisa menguraikan secara dialektis kesimpulan yang sudah disusunnya itu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, C. (1994). *Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Al-Ikhlash.
- Hasbullah. (1999). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Karsidi, R. (2005). *Sosiologi Pendidikan*. Surakarta: UNS Press.
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nasdian, F. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Santosa, I. B. (2009). *Kumpulan Peribahasa Indonesia: Dari Aceh Sampai Papua*. Yogyakarta: IndonesiaTera.
- Sunarto, K. (2008). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Suryabrata, S. (1984). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, U. (2000). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

